



Aktor Supervisi Guru

Leyli Desra Asrol¹, Nofik Afriko², Sufyarma Marsidin³, Rifma⁴

¹ Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

² Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

^{2,4} Universitas Negeri Padang, Padang

Corresponding Author: ✉ rifmar34@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

Supervisi pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dengan mengembangkan guru. Posisi dan kualitas supervisor sangat penting untuk pengalaman supervisi yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor pelaksana supervisi guru yang efektif. Jadi, administrator sekolah dan guru yang bekerja di SMP Pasaman Barat. Hasil menunjukkan bahwa peserta menyarankan pelaku pengawasan yang berbeda dalam dimensi pengawasan guru yang berbeda. Secara umum, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala departemen dan preferensi siswa telah muncul ke permukaan. Guru, administrator dan supervisor menyarankan aktor pengawasan yang berbeda.

Kata Kunci

Supervisi Guru, Pelaku Pengawasan, Pengawasan, Inspeksi.

PENDAHULUAN

Saat ini, kualitas pendidikan adalah faktor kunci dalam kesejahteraan negara. Untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, fokus kebijakan pendidikan harus pembangunan berkelanjutan. Untuk memulai dan mempertahankan sasaran pembangunan di bidang pendidikan, perlu untuk menentukan situasi saat ini dengan benar, mengidentifikasi titik kuat dan lemah, menganalisis efektivitas metode dan teknik yang diterapkan, serta memandu proses pendidikan dan pelatihan oleh para ahli. Semua ini dimungkinkan dengan operasi yang sehat dan renovasi supervisi pendidikan sebagai subsistem dari sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi supervisi guru dalam praktik berdasarkan pendapat partisipan adalah penelitian survei. Penelitian survei bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kasus dengan karakteristiknya saat ini (Rossi, Wright dan Anderson, 2013; Creswell, 2012, 376) dengan mendapatkan opini individu tentang kasus atau fenomena tersebut (Lodico, Spaulding dan Voegtler, 2006, 157; Scott dan Morrison, 2007, 232).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepala sekolah lebih diutamakan sebagai aktor pengawasan utama. Secara umum merupakan pilihan utama peserta dalam semua dimensi supervisi guru. Peserta umumnya lebih menyukai "pengawasan dokumen" dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala jurusan masing-masing. Hasil yang menarik adalah bahwa kepala departemen dan wakil kepala sekolah adalah salah satu pilihan utama, meskipun mereka tidak memiliki peran pengawasan hukum. Karena pengawasan dokumen meliputi pengawasan terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan pengajaran, maka usulan ketua jurusan merupakan temuan penting. Dapat disimpulkan bahwa peserta bergantung pada pengawasan kepala departemen. Selain itu, supervisor kementerian Depdiknas umumnya tidak disukai. Pada dimensi "perencanaan pembelajaran" kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala departemen dan pengawas provinsi Depdiknas lebih diutamakan, sedangkan pada dimensi "bahan dan teknologi lingkungan belajar mengajar" kepala sekolah dan wakil kepala sekolah diusulkan sebagai aktor pengawas utama. Mengingat butir-butir dimensi ini berkaitan dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas, kebersihan lingkungan dan bahan ajar, maka merupakan temuan yang berarti untuk merekomendasikan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai orang yang mengenal sekolah secara dekat dan dapat menghasilkan solusi dengan cara terpendek.

Dalam dimensi "menghargai dan membimbing siswa", disarankan adanya pengawasan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan siswa. Kategori siswa disarankan di tempat ketiga dan itu adalah temuan yang luar biasa. Para peserta berpikir bahwa siswa dapat mengawasi status guru dalam menilai dan membimbing siswa. Aktor pengawas yang diusulkan dalam dimensi "program bidang khusus/pengetahuan isi" adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan pengawas provinsi Depdiknas. Kepala departemen juga diusulkan pada tingkat yang dekat dengan pengawas provinsi Depdiknas. Meskipun kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mungkin bukan rekan lapangan guru, temuan menarik bahwa mereka disarankan untuk supervisi lapangan khusus. Di sisi lain, terutama kepala sekolah, kepala departemen dan wakil kepala sekolah direkomendasikan untuk mengawasi "proses mengajar" guru. Pengawasan proses pengajaran entah bagaimana melibatkan pengawasan kegiatan kelas. Peserta mungkin berpikir bahwa pengawasan guru oleh pemangku kepentingan sekolah akan membuat mereka merasa nyaman. Selain itu, pengawasan diri guru dan pengawasan orang tua juga disarankan pada tingkat yang sangat rendah untuk dimensi ini. Terakhir, guru diharapkan disupervisi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tentang karakteristik individu mereka. Kepala departemen, mahasiswa dan pengawas provinsi Depdiknas juga diusulkan pada tingkat yang luar biasa untuk dimensi ini.

Pemilihan kepala sekolah sebagai aktor pengawasan utama dapat dikaitkan baik dengan tanggung jawab administratif dan pengawasan hukum serta sebagai orang yang paling mengenal sekolah dan guru. Kepala sekolah berkewajiban membantu guru menemukan cara untuk membuat program dan pengajaran sekolah lebih efektif karena tanggung jawab mereka (Henson, 2010, 70), sehingga peserta mungkin ingin kepala sekolah untuk mengawasi guru berdasarkan harapan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supervisi instruksional administrator sekolah berpengaruh positif terhadap persepsi guru tentang keandalan kepala sekolah. Temuan penelitian Wahnee (2010) menyimpulkan bahwa variabel supervisi instruksional merupakan determinan terkuat dari kepercayaan terhadap kepala sekolah. Pengawasan instruksional saja menyumbang 98% dari variabel kepercayaan di sekolah kepada kepala sekolah. Akibatnya, peningkatan peran kepala sekolah dalam supervisi guru dapat meningkatkan kepercayaan kepala sekolah dan dengan demikian memperkuat budaya perusahaan di sekolah. Di sisi lain, dapat dipikirkan bahwa kepala sekolah yang akan mengambil bagian dalam supervisi guru harus menjalani beberapa pelatihan untuk mendapatkan kompetensi. Menurut hasil penelitian Minnear-Peplinski (2009), kepala sekolah dengan gelar master lebih banyak menggunakan teknik evaluasi baik dalam jumlah maupun variasi. Selain itu, supervisi instruksional dan pelatihan kepemimpinan yang diberikan kepada administrator dapat menjadi sumber pendekatan supervisi yang lebih produktif. Faktanya, Grizzard (2007) mencapai kesimpulan berikut: Antara kepala sekolah yang mendapatkan pelatihan supervisi instruksional dan menerapkan teknik supervisi klinis dengan yang tidak mendapatkan pelatihan dan menerapkan teknik tersebut, ditemukan perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah observasi guru yang dilakukan untuk meningkatkan pengajaran. Selain itu, keterampilan supervisi instruksional kepala sekolah mempengaruhi motivasi kerja guru (Yılmaz, 2019). Jadi, semua variabel tersebut mungkin berpengaruh pada preferensi peserta. Di sisi lain ada beberapa temuan penelitian yang mencerminkan sikap negatif guru tentang peran pengawasan kepala sekolah. Temuan penelitian Koç (2018) mengungkapkan bahwa guru berpikir bahwa kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk pengawasan, mereka tidak cukup memenuhi syarat, hubungan pribadi dan preferensi politik mereka mempengaruhi pengawasan.

Ini adalah temuan yang signifikan bahwa para peserta menyarankan kepala sekolah sebagai aktor pengawasan, tetapi ketika beban kerja dan masalah waktu kepala sekolah dipertimbangkan, ada kebutuhan untuk membuat beberapa pengaturan dalam sistem. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Kurt (2009) untuk mendapatkan pendapat dari pihak pengelola sekolah tentang kegiatan supervisi, pihak sekolah tidak mematuhi jadwal waktu tertentu untuk melakukan supervisi. Mereka berimprovisasi sesuai dengan proporsi guru dan beban kerja. Sebagian besar pengelola sekolah merasa tidak puas dengan sistem supervisi yang ada di dunia pendidikan. Kepala sekolah pada

umumnya wajib melakukan pengawasan sesuai dengan arahan yang diterima dari pengawas profesional dan direktorat pendidikan nasional provinsi. Pengelola sekolah menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan ketika melakukan pembinaan terhadap guru di atas usia tertentu atau melewati usia pensiun. Pihak sekolah berpendapat bahwa guru yang disupervisi tidak puas karena mereka mengamati stres, kepanikan, dan kegembiraan pada personel sekolah. Ketika temuan ini dievaluasi, dapat diindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk pemecahan masalah dan pengembangan pengaturan dalam peran pengawasan kepala sekolah.

Merupakan temuan menarik dari penelitian saat ini bahwa pengawas Kementerian Depdiknas kurang disukai oleh peserta. Tingkat preferensi pengawas provinsi Depdiknas, yang secara resmi bertanggung jawab untuk pengawasan guru, juga lebih rendah daripada kepala sekolah. Hal ini mungkin disebabkan oleh permasalahan peserta tentang supervisi. Misalnya, menurut temuan studi di mana supervisor melaporkan pengalaman mereka pada aspek terapan dan administrasi supervisi, kegiatan pengawasan nyata tidak konsisten dengan "kegiatan pengawasan klinis yang berhasil". Pengawas menekankan bahwa mereka tidak diberi waktu, sumber daya yang cukup, dan kompensasi finansial untuk melakukan supervisi yang ideal. Banyak supervisor (66%) tidak mengikuti kursus supervisi klinis selama pelatihan mereka. 89% peserta pelatihan supervisi klinis menekankan bahwa mereka memperoleh informasi melalui instruksi langsung. 70% supervisor menyatakan tidak memiliki pengalaman magang (Rose, 2009). Ada banyak penelitian seperti ini yang menunjukkan ketidakcukupan pengawas dan masalah yang terkait dengan kekurangan mereka (Yavuz, 1995; Macit, 2003; Kunduz, 2007; elik, 2010; Polat, 2010; Ilgaz, 2011; Karakuş, 2011; Köroğlu; 2011; Memduhoğlu dan Rich, 2011). Ketidakcukupan ini dapat mencegah supervisor menjadi pilihan utama.

Menarik untuk dicatat bahwa wakil kepala sekolah sangat direkomendasikan oleh para peserta, meskipun tidak ada peran pengawasan hukum dari mereka. Dalam sistem pengawasan beberapa negara, wakil kepala sekolah memiliki tugas pengawasan. Jadi, mereka mungkin calon yang tepat untuk mengawasi guru pada masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian Begum (2008), kepala sekolah ditanya "Apakah wakil kepala sekolah orang yang paling tepat untuk melakukan supervisi guru?" 56% dari peserta menjawab ya, 16,7% dari mereka mengatakan tidak dan 24,5% dari mereka mengatakan wakil kepala sekolah adalah yang paling tepat di antara pilihan yang mungkin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai tugas pengawasan wakil kepala sekolah.

Kepala departemen adalah pemangku kepentingan pendidikan lain yang tidak memiliki tugas pengawasan hukum. Ketua jurusan mungkin lebih diutamakan karena peserta menginginkan supervisi guru dilakukan oleh ahli bidang. Saat ini, peer review adalah pendekatan yang disarankan oleh para ahli dan diklaim mendukung kolaborasi

dan pengembangan (Sullivan dan Glanz, 2009, 154). Selain itu, dalam beberapa penelitian, salah satu masalah utama yang dikemukakan guru tentang supervisi adalah tidak dapat disupervisi oleh ahli lapangan (Altun dan Sarpkaya, 2014; Erim, 2004; Kaya, 2006). Untuk alasan ini, bidang keahlian kepala departemen dapat dipercaya dan mungkin lebih baik untuk mengawasi guru.

Juga merupakan temuan penting dalam hal penelitian bahwa pengawasan siswa terhadap guru, pengawasan diri sendiri dan pengawasan orang tua berada dalam aktor pengawasan yang disarankan. Meskipun tidak terwakili secara rinci dalam Tabel, rasio aktor-aktor tersebut dikumpulkan di bawah opsi lain. Para peserta mencerminkan pandangan bahwa guru dapat diawasi oleh orang yang berbeda, meskipun pada tingkat yang rendah. Karena siswa, orang tua dan guru sendiri adalah aktor pengawasan penting dari sistem pendidikan kontemporer, ini menjanjikan kesiapan sistem.

Ketika pendapat para peserta disandingkan sebagai guru, administrator dan supervisor, terlihat bahwa kelompok profesi yang berbeda memiliki harapan yang berbeda terhadap orang yang akan melakukan supervisi. Guru dari peserta umumnya berpendapat bahwa supervisi guru harus dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan kepala departemen. Guru di antara semua peserta memiliki saran yang paling beragam untuk aktor pengawasan. Mereka adalah satu-satunya kelompok yang menyarankan siswa sebagai aktor pengawasan pada tingkat yang luar biasa. Mereka juga berpendapat bahwa beberapa karakteristik guru mungkin diawasi oleh pengawas provinsi Depdiknas, pengawas kementerian Depdiknas, layanan bimbingan sekolah, rekan lapangan khusus, guru itu sendiri dan orang tua, bahkan dengan tarif yang rendah.

Administrator pada umumnya mengutamakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan pengawas provinsi Depdiknas sebagai pelaku supervisi guru. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa siswa dan pilihan lain tidak disukai oleh sebagian besar administrator. Dalam beberapa dimensi, kepala departemen juga termasuk di antara para pengurus. Pengawas umumnya merekomendasikan kepala sekolah dan diri mereka sendiri untuk mengawasi kriteria yang digunakan dalam supervisi guru. Terlihat bahwa pengawas hanya memilih mereka yang memiliki tugas pengawasan yang diatur oleh undang-undang. Pengawas kementerian Depdiknas, mahasiswa, kepala departemen dan pilihan lainnya umumnya tidak disukai oleh inspektur provinsi Depdiknas.

Ketua jurusan dan juga kategori mahasiswa banyak disukai oleh para guru di antara para peserta. Administrator memiliki sedikit kecenderungan untuk kategori siswa, dan supervisor hampir tidak pernah. Pengawas provinsi Depdiknas paling direkomendasikan oleh pengawas dan paling tidak oleh guru. Pengawas kementerian Depdiknas lebih disukai dengan persentase yang sangat rendah selama penelitian.

Alasan utama untuk ini mungkin kekurangan kuantitatif dan kualitatif pengawas (Oktar, 2010). Pendapat negatif guru tentang ketidakmampuan pengawas mungkin menyebabkan mereka beralih ke kepala departemen dan menghilangkan pengawas.

Sementara guru menganggap pengawas tidak cukup, pengawas menganggap guru enggan dalam proses bimbingan (Erdem, 2010). Ada perbedaan persepsi yang serius antara guru dan supervisor (Oktar, 2010). Menurut temuan ahin (2005), supervisor menganggap kualifikasi mereka pada level tinggi dan penuh, dan guru menganggapnya pada level menengah atau rendah, dan dalam penelitian ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi supervisor dan guru tentang kualifikasi pengawas. Demikian pula menurut hasil penelitian Köroğlu (2011), untuk pembinaan pengawas pendidikan, atas nama pengembangan profesional gurunya, guru dan administrator menunjukkan bahwa itu adalah "tingkat bawah" atau "tingkat menengah" sementara pengawas pendidikan berpikir bahwa bimbingan mereka pada "tingkat tinggi". Perbedaan persepsi ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa guru menganggap pengawas tidak cukup dan tidak memilih mereka terlebih dahulu. Merupakan temuan penting bahwa pejabat yang diangkat oleh Kementerian untuk posisi pengawasan tidak disukai oleh para guru. Hal ini mungkin juga terkait dengan persepsi guru tentang supervisi sebagai kegiatan kontrol untuk menemukan kelemahan mereka (Şener, 2011), tetapi karena guru pada umumnya tidak menentang supervisi, dapat disimpulkan bahwa guru mungkin terganggu selama supervisi dilakukan oleh pengawas resmi. Temuan lain dari studi ener (2011) mendukung pandangan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas menunjukkan sikap otoriter dan pemberontak selama pelaksanaan proses pengawasan yang jauh dari membimbing, dan bahwa pengawasan tidak cukup memenuhi tujuan utamanya, seperti bimbingan dan konseling. Selain itu, menurut temuan penelitian Balcı (2012), guru berpikir bahwa supervisor sering menggunakan gaya direktif, terkadang gaya non-direktif dan jarang menggunakan gaya kooperatif. Depdiknas membuat peraturan hukum yang mendukung temuan ini dan mengecualikan pengawas kementerian dari pengawasan guru (Depdiknas, 2016a).

Alasan pengawas untuk mengambil tugas pengawasan sampai batas tertentu mungkin karena mereka menganggap diri mereka cukup dalam bidang ini. Di lapangan, terdapat bukti bahwa persepsi efikasi pengawas berada pada level yang tinggi (Oktar, 2010; ahin, 2005; ener, 2011). Oleh karena itu, supervisor mungkin berpikir bahwa supervisi harus dilakukan sendiri karena keyakinan self-efficacy mereka berada pada level yang tinggi. Di sisi lain, pengawas yang bekerja di bawah birokrasi yang berat mungkin telah menyatakan pandangan mereka ke arah ini karena mereka berkomitmen pada hukum dan otoritas. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa supervisor tidak terbuka terhadap alternatif pilihan supervisor.

Ada temuan penelitian bahwa guru tidak puas dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Menurut hasil penelitian Altun dan Sarpkaya (2014), guru beranggapan bahwa supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak memiliki kontribusi selain untuk mengetahui dokumen mana yang hilang. Di sisi lain, menurut temuan penelitian Bayraktutan (2011), kepala sekolah mempersepsikan keterampilan pengawasan mereka pada tingkat "baik" dan guru mempersepsikan keterampilan pengawasan mereka pada tingkat "agak". Namun demikian, ini adalah temuan yang menarik bahwa guru merekomendasikan kepala sekolah untuk pengawasan mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki pengalaman pengawasan yang berkualitas dengan kepala sekolah, atau mereka mungkin berpikir bahwa kepala sekolah adalah orang yang paling efektif dalam dinamika sekolah. Ada juga temuan penelitian bahwa sebagian besar guru disupervisi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan supervisor tidak terlibat secara aktif (Tesfaw dan Hofman, 2012). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang peran pengawasan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah perlu ditinjau kembali.

KESIMPULAN

Mengingat temuan yang diperoleh dari penelitian ini, di mana pendapat supervisor, administrator dan guru tentang "Supervisi Guru" dicoba untuk ditentukan, beberapa saran dapat diajukan kepada praktisi dan peneliti. Para peserta mengusulkan kepala sekolah sebagai pengawas guru dengan nilai tertinggi dan mufakat. Peraturan dapat dibuat mengenai pelatihan kepala sekolah, beban kerja dan tugas pengawasan. Sebagai aktor pengawasan, wakil kepala sekolah dan kepala departemen diusulkan dengan tarif yang sangat tinggi. Di sisi lain, kedua pemangku kepentingan ini tidak memiliki tugas pengawasan hukum. Regulasi dapat ditingkatkan ke arah ini untuk kerjasama yang sistematis. Terlihat bahwa guru pada umumnya kurang berorientasi pada pilihan supervisor untuk orang yang akan melakukan supervisi. Pertemuan pelatihan dan kegiatan sosial dapat diselenggarakan untuk memperkuat kerjasama supervisor - guru. Guru telah menghadirkan berbagai pilihan sebagai pengawas mereka, tetapi dalam sistem yang ada mereka hanya dapat diawasi oleh kepala sekolah dan pengawas provinsi Depdiknas. Sistem dapat dinilai kembali untuk memenuhi kebutuhan guru ke arah ini. Selain itu, sebuah studi menyelidiki alasan mengapa guru tidak memilih supervisor dapat dirancang. Pengawas provinsi Depdiknas mengevaluasi tugas pengawasan khusus untuk diri mereka sendiri dan kepala sekolah, dan umumnya mengabaikan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian dapat dilakukan untuk menguji alasan persepsi mereka. Kajian kualitatif dapat dilakukan dengan alasan adanya perbedaan pendapat pengawas, pengelola dan guru mengenai siapa yang harus melakukan supervisi guru. Penelitian kualitatif dapat dirancang

untuk mengungkap alasan mengapa para peserta umumnya tidak memilih pengawas kementerian Depdiknas untuk pengawasan guru.

DAFTAR PSUTAKA

- Acheson, KA dan Gall, MD (2003). *Supervisi klinis dan pengembangan guru - pra-jabatan dan dalam-jabatan aplikasi*. AS: John Wiley & Sons, Inc.
- Begum, F. (2008). *Asisten kepala sekolah dan supervisi guru: peran, tanggung jawab, dan peraturan* (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Houston, Calhoun.
- Berson, E., J. (2012). *Perspektif guru tentang kebijakan & praktik supervisi guru di sekolah piagam di pennsylvania* (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Kuil, Philedelphia.
- Brookover, WB, Erickson, FJ dan McEvoy, AW (1995). *Menciptakan sekolah yang efektif: sebuah inprogram pengabdian untuk meningkatkan iklim dan prestasi belajar sekolah*. Virginia: Belajar Pulikasi.
- Bursalioğlu, Z. (2012). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Büyüköztürk, . (2005). *Anket gelişwaktu*. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 297-315.
- elik, . (2010). *Eğitim müfettişlerinin inceleme ve soruşturma sürecinde yaptıkları hatalar* (Tidak diterbitkan Tesis Magister). Ankara niversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Creswell, JW (2012). *Perencanaan penelitian pendidikan, pelaksanaan dan evaluasi kuantitatif dan kualitatif riset*. AS: Pearson Education, Inc.
- Enns, F. (1965). *Penilaian efektivitas guru: Fungsi kepala sekolah*. *Jurnal Pendidikan Administrasi*, 3(2), 81 - 95.
- Glickman, CD, Gordon, SP dan Ross-Gordon, JM (2009). *Panduan dasar untuk pengawasan dan kepemimpinan instruksional*. AS: Pearson Education, Inc.
- Grizzard, T. (2007). *Dampak kepemimpinan instruksional pada iklim sekolah: model untuk kepala sekolah dan guru peningkatan* (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Negeri Tennessee, Nashville.
- Henson, K., T. (2010). *Pengawasan: Pendekatan kolaboratif untuk peningkatan instruksional*. Tanah Ombak: Panjang Grove, IL.
- Ilgaz, A. . (2011). *retmen performansına denetimin ve yöneticilerin etkileri* (Tidak diterbitkan Tesis Magister). Maltepe niversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul.
- slamoğlu, AH dan Alnaçık, . (2013). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. stanbul: Beta Yayıncılık.
- Kalule, L. dan Bouchamma, Y. (2013). *Persepsi supervisor terhadap supervisi instruksional*. *Studi Internasional dalam Administrasi Pendidikan*, 41(1), 89-104.
- Marzano, RJ, Perbatasan, T. dan Livingston, D. (2011). *Pengawasan yang efektif - mendukung seni dan sains mengajar*. Virginia: Buku Anggota ASCD.

- Muijs, D. (2004).Melakukan penelitian kuantitatif di bidang pendidikan dengan spss. London: Publikasi Sage.
- Neuman, WL (2007).Dasar-dasar penelitian sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif. AS: Pearson Pendidikan, Inc.
- Rossi, PH, Wright, JD, dan Anderson, AB (2013). Contoh survei: Sejarah, Praktek saat ini, dan prospek masa depan. (Ed. PH Rossi, JD Wright dan AB Anderson). DiBuku pegangan penelitian survei. 1-20. New York: Pers Akademik.
- Sergiovanni, TJ dan Starratt, RJ (1979).Mengawasi perspektif manusia.AS: McGraw-Hill, Inc.
- Sindhvad, SP (2009). Kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional: penyelidikan kapasitas kepemimpinan sekolah di orang Filipina(Tesis Master tidak diterbitkan). Universitas Minnesota.
- Sullivan, S. dan Glanz, J. (2000). Pendekatan alternatif untuk supervisi: kasus dari lapangan.Jurnal Kurikulum dan Pengawasan, 15(3), 212-235.
- Sullivan, S. dan Glanz, J. (2009).Supervisi yang meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.California: Corwin A Perusahaan SAGE.
- Taymaz, H. (2011).Eitim sisteminde tefti. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Tesfaw, TA dan Hofman, RH (2012).Supervisi instruksional dan hubungannya dengan profesional perkembangan: persepsi guru sekolah menengah swasta dan negeri di Addis Ababa (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Groningen, Belanda.
- Itanır, G. (2003).Eitimde planlama dan deęerlendirilmede kuram dan teknikler.Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Wahnee, RL (2010).Pengaruh supervisi instruksional pada kepercayaan kepala sekolah(Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Oklahoma, Norman, Oklahoma.
- Wiles, J. dan Bondi, J. (2000).Supervisi panduan untuk berlatih. New Jersey: Prentice Hall.
- Wolfrom, DH (2009).Mempromosikan pertumbuhan profesional dengan memenuhi kebutuhan guru: panduan sebagai pendekatan pengawasan(Tesis PhD tidak diterbitkan). Universitas Maine Selatan, Portland.